



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 306 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul merupakan bencana non alam yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan dampak negatif di berbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu ditangani dengan segera agar tidak menimbulkan dampak yang lebih parah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul, perlu penggunaan dana Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 49);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 57);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul;
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 291 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul;

Memperhatikan :

1. Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Nomor 913/2242 tanggal 9 Juni 2020 perihal Permohonan Ijin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Penanganan Covid-19;
2. Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Nomor 900/3037 tanggal 9 Juni 2020 perihal Permohonan Ijin Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19 dan Puskesmas di Kabupaten Bantul;
3. Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Nomor 900/0922 tanggal 9 Juni 2020 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Kegiatan Mobilisasi/Sosialisasi ke Warga Masyarakat (Patroli Wilayah) dan Kegiatan Pemberdayaan Linmas pada masa tanggap darurat bencana; dan
4. Surat dari Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul Nomor 900/00128 tanggal 9 Juni 2020 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk menunjang kegiatan sekretariat Posko Gugus Tugas Covid-19 dan Tenaga Medis yang menginap di Rumah Dinas Bupati dan di BPSDM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.

KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp11.669.362.200,00 (sebelas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebesar Rp4.873.966.200,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebesar Rp6.432.766.000,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebesar Rp292.930.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
- d. Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul sebesar Rp69.700.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk :

- a. pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan penanganan Covid-19;
- b. pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19 dan Puskesmas di Kabupaten Bantul;
- c. kegiatan mobilisasi/sosialisasi ke warga masyarakat (patroli wilayah) dan kegiatan pemberdayaan Linmas pada masa tanggap darurat bencana; dan
- d. menunjang kegiatan sekretariat Posko Gugus Tugas Covid-19 dan tenaga medis yang menginap di Rumah Dinas Bupati Bantul dan di BPSDM.

- KETIGA : Menugaskan kepada :
- a. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul untuk melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan penanganan Covid-19;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19 dan Puskesmas di Kabupaten Bantul;
 - c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul untuk melaksanakan kegiatan mobilisasi/sosialisasi ke warga masyarakat (patroli wilayah) dan kegiatan pemberdayaan Linmas pada masa tanggap darurat bencana;
 - d. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul untuk melaksanakan pemenuhan kegiatan sekretariat Posko Gugus Tugas Covid-19 dan tenaga medis yang menginap di Rumah Dinas Bupati Bantul dan di BPSDM; dan
 - e. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dan Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Juni 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.s. Kepala Bagian Hukum

